

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012:581), definisi dari miskin adalah tidak berharta benda, sangat melarat, serba kekurangan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional yang mencakup berbagai aspek seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dll. Kemiskinan ini sudah menjadi permasalahan yang sangat fenomenal hampir di setiap Negara di dunia terutama Negara berkembang seperti Indonesia, tak ada ujungnya tak ada penyelesaiannya hingga saat ini kemiskinan masih merajalela di Indonesia.

Indonesia termasuk kedalam 5 negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia, Indonesia menduduki urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 260 juta jiwa, maka dari itu Indonesia tidak dapat terhindar dari kemiskinan salah satu faktor pendorongnya adalah karena persebaran penduduk yang tidak merata yang diikuti dengan pemerataan ekonomi yang kurang baik. Masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di daerah-daerah terpencil dengan fasilitas yang kurang memadai bahkan tidak layak, dan masih ada juga masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran kota-kota besar yang notabenehnya kota tersebut adalah kota yang sudah maju.

Permasalahan kemiskinan ini perlu penanganan yang serius dan berkelanjutan, penanganan ini dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja

namun harus mencakup kesadaran seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (sandang, pangan, papan) yang dikarenakan pengangguran, karena tidak bekerja, sehingga tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sholekah, 2016). Kemiskinan dapat dikatakan apabila orang tersebut tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran yang menyebabkan kurangnya pendapatan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat terlepas dari bagaimana cara meningkatkan PDRB yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri, masalah pendidikan, tingkat kesehatan, jumlah penduduk di suatu daerah tersebut karena semua itu mempengaruhi kemiskinan.

Sudah ada upaya dari pemerintah namun masih ada saja kesenjangan antara rencana dan pencapaian tujuan, oleh karena itu harus adanya suatu strategi dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terintegritas dengan harapan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan ini secara tuntas dan tepat (Saputra, 2011). Upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan ini dengan cara melakukan pembangunan nasional ke daerah-daerah terpencil yang relatif masih memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah tersebut. Upaya dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan didukung oleh lembaga-lembaga dan seluruh lapisan masyarakat yang bersangkutan. Upaya ini dilakukan dari berbagai aspek

pembangunan baik berupa aspek sosial, budaya, ekonomi, dll. Upaya pembangunan ini harus dilakukan secara berkesinambungan dari seluruh aspek agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa provinsi yang menyumbang angka kemiskinan yang cukup tinggi bagi Indonesia salah satunya adalah provinsi Jawa Barat.

Table 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi
se-Indonesia(Ribu Jiwa)
Tahun 2014-2015

No	Provinsi	2014		2015	
		Maret	September	Maret	September
1	Aceh	881.26	837.42	851.59	859.41
2	Sumatera Utara	1286.67	1360.60	1463.7	1508.14
3	Sumatera Barat	379.20	354.74	379.61	349.53
4	Riau	499.88	498.28	531.39	562.92
5	Jambi	263.80	281.75	300.71	311.56
6	Sumatera Selatan	1100.83	1085.80	1145.6	1112.53
7	Bengkulu	320.95	316.50	334.07	322.83
8	Lampung	1142.92	1143.93	1163.5	1100.68
9	Kep. Bangka Belitung	71.64	67.23	74.09	66.62
10	Kep. Riau	127.80	124.17	122.4	114.83
11	DKI Jakarta	393.98	412.79	398.92	368.67
12	Jawa Barat	4327.07	4238.96	4435.7	4485.65
13	Jawa Tengah	4836.45	4561.82	4577	4505.78
14	DI Yogyakarta	544.87	532.59	550.23	485.56
15	Jawa Timur	4786.79	4748.42	4789.1	4775.97
16	Banten	622.84	649.19	702.4	690.67
17	Bali	185.20	195.95	196.71	218.79
18	Nusa Tenggara Barat	820.82	816.62	823.89	802.29
19	Nusa Tenggara Timur	994.67	991.88	1159.8	1160.53
20	Kalimantan Barat	401.51	381.92	383.7	405.51
21	Kalimantan tengah	146.32	148.82	147.7	148.13
22	Kalimantan Selatan	182.88	189.50	198.44	189.16
23	Kalimantan Timur	253.60	252.68	212.89	209.99

Lanjutan Tabel 1.1

24	Kalimantan Utara	-	-	39.69	40.93
25	Sulawesi Utara	208.23	197.56	208.54	217.15
26	Sulawesi Tengah	392.65	387.06	421.62	406.34
27	Sulawesi Selatan	864.30	806.35	797.72	864.51
28	Sulawesi tenggara	342.25	314.09	321.88	345.02
29	Gorontalo	194.17	195.10	206.84	206.51
30	Sulawesi Barat	153.89	154.69	160.48	153.21
31	Maluku	316.11	307.02	328.41	327.78
32	Maluku Utara	82.64	84.79	79.9	72.65
33	Papua Barat	229.43	225.46	225.36	225.54
34	Papua	924.40	864.11	859.15	898.21

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa Jawa Barat termasuk kedalam provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dapat dilihat jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2014 yaitu sebesar 4327,07 ribu orang dan pada bulan September 2014 penduduk miskin di Jawa Barat yaitu sebesar 4238,96 ribu orang, yang artinya pada tahun 2014 ini dari semester 1 (bulan Maret) ke semester 2 (bulan September) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2015 yaitu sebesar 4435,7 ribu orang atau sebesar 9,53 persen dan pada bulan September 2015 yaitu sebesar 4485,65 ribu orang atau sebesar 9,57 persen, yang artinya jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 49,95 ribu atau naik sebesar 0,04 persen.

Kemiskinan menjadi salah satu indikator ekonomi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, salah satunya di Jawa Barat. Tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat menunjukkan masih

rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, naik turunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pun belum stabil dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan (berfluktuasinya jumlah penduduk miskin) di Jawa Barat, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jumlah penduduk yang terus bertambah, tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat, indeks pembangunan manusia, dan sebagainya.

Definisi pembangunan adalah pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah dengan penurunan laju jumlah penduduk miskin dan tidak terlepas juga dari pertumbuhan ekonomi (Saputra, 2011). Pertumbuhan ekonomi sangatlah penting bagi suatu Negara, karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan mempengaruhi pertumbuhan disegala bidang lainnya, salah satunya dapat meningkatnya PDRB. Pertumbuhan penduduk sangatlah erat kaitannya dengan kemiskinan, tinggi rendahnya jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi, tingginya tingkat kelahiran (fertilitas) di suatu daerah sudah pasti mempengaruhi pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Di Indonesia tingkat kelahiran masih terbilang tinggi, dan sebagian besar berasal dari penduduk miskin, hal ini bisa berdampak negatif bagi pertumbuhan

ekonomi di daerah tersebut, dikarenakan anak yang lahir di masyarakat golongan miskin akan menjadi beban tanggungan bagi keluarganya sendiri. Miskin disini tidak hanya orang yang menganggur/tidak memiliki pekerjaan, tetapi orang yang bekerja namun tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya pun mereka sulit, dengan otomatis mereka akan kekurangan biaya dalam setiap aktivitas hidupnya, bahkan kesehatan, dan pendidikannya pun akan terancam. Kesehatannya akan terancam karena buruknya kondisi lingkungan sekitar dan ketidakmampuan keluarga untuk mengakses sarana kesehatan yang layak, begitupun dalam hal pendidikannya. Jika dilihat dari sisi lain, pertumbuhan penduduk akan memberi dampak positif bagi Negara apabila setiap adanya pertumbuhan penduduk diiringi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik, dan memiliki keahlian yang baik dibidangnya, ini akan membantu pertumbuhan ekonomi Negara.

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 46.497.175 juta jiwa, yang tersebar di berbagai penjuru kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat. Kabupaten Bogor menempati posisi jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat sebanyak 4.966.621 Jiwa (11,03 %), sedangkan Kota Banjar menempati posisi dengan jumlah penduduk terkecil di Jawa Barat yaitu sebanyak 192.903 Jiwa (0,43 %). Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi) sebanyak 8.670.501 jiwa atau 18% dari total keseluruhan penduduk Jawa Barat, yang berarti bahwa hampir seperlima penduduk Jawa

Barat lebih memilih tinggal di wilayah Bandung Raya/Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Jabarprov, 2011).

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Jawa Barat khususnya dan bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, karena kemiskinan itu suatu permasalahan yang kompleks dan tidak pernah terselesaikan hingga saat ini. Dan Jawa Barat juga termasuk provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang padat yaitu sebesar 43.053.732 jiwa dengan jumlah penduduk di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915 jiwa atau (65,69 persen) dan jumlah penduduk di daerah perdesaan sebanyak 14.770.817 jiwa atau (34,31 persen), kurang meratanya persebaran penduduk antara daerah perkotaan dan pedesaan yang dapat memicu kurang baiknya pemerataan ekonomi, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Sehingga hal ini memungkinkan terjadinya ketimpangan sosial antara penduduk kota dan penduduk desa.

Dengan adanya fasilitas yang memadai di perkotaan membuat masyarakat desa banyak yang datang ke kota-kota besar di Jawa Barat dengan tujuan ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan terjamin, fasilitas yang lebih memadai dan lebih maju dibandingkan di desa. Namun, pada kenyataannya mereka kebanyakan datang ke kota tanpa memiliki *skill* atau modal yang baik dan persaingan di kota pun jauh lebih ketat sehingga ekspektasi untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik itu tidak terjadi, mereka malah terlanting-lanting di kota besar tersebut tidak mendapat pekerjaan bahkan malah mereka untuk makan pun jadi susah,

mereka pun ujungnya menjadi pengangguran juga yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di kota tersebut, tidak memiliki pendapatan, dan ujungnya mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga mereka dapat dikatakan miskin juga. Sehingga tingkat kemiskinan di kota tersebut pun meningkat, hal seperti ini sudah sering dijumpai di kota-kota besar.

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu sebesar 1,8 juta orang dan lebih dari 50% jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat, yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya lebih memilih untuk bekerja secara mandiri. Pemerintah Jawa Barat masih berupaya untuk mendorong semakin banyaknya para pencari kerja yang berdasarkan memilih untuk menjalankan usaha mandiri agar dapat membantu perluasan lapangan pekerjaan yang baru. Mereka harus memiliki pengetahuan akan pengembangan usaha mandiri, keterampilan yang baik agar dapat bersaing di era modern seperti saat ini, semua itu bisa didapatkan melalui pendidikan baik pendidikan secara formal maupun informal.

Pendidikan sangatlah erat kaitannya dengan kemiskinan, dan sangat berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan karena pendidikan memberikan ruang untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan (*softskill*). Bagi masyarakat golongan miskin pendidikan dapat menjadi salah satu jalan keluar dari keterpurukan ekonomi keluarga, mereka menganggap semakin tinggi pendidikan maka semakin besar juga peluang untuk keluar dari

lingkaran setan (*vicious circle*). Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin banyak pula penguasaan ilmunya, termasuk dalam hal kesehatan. Mereka akan menyadari bahwa pentingnya pendidikan, kesadaran meningkatkan ekonomi, dan kesadaran meningkatkan kesehatan baik fisik maupun psikisnya. Masyarakat golongan miskin biasanya mengalami masalah dalam hal kesehatan, mereka terhalang dalam mengakses layanan kesehatan karena tidak mampunya keluarga untuk menanggung beban biaya. Mereka masih menganggap bahwa dengan banyak anak banyak rezeki, tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun mereka masih kesulitan. Yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan, anak yang kekurangan asupan gizi, faktor lingkungan sekitar tempat tinggal yang kumuh pun dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan masih menjadi isu strategis di Jawa Barat karena masih banyak permasalahan seperti ini, isu ini menjadi program utama yang secara otomatis akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat itu sendiri. Namun sampai saat ini program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, padahal sudah dilakukan dengan segala upaya pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang berkaitan, hal ini karena dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan masih menggunakan pendekatan ekonomi yang bersifat materialistik (Bkkbn Jabar, 2011). Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan membahas

mengenai “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat (Studi Kasus 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015)”.

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi, yaitu membahas mengenai variabel-variabel yang menjadi objek penelitian dan instrument penelitian antara lain Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pendidikan, Kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam penelitian ini yang digunakan adalah data di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas di atas, dalam penelitian ini akan ada beberapa konteks pembahasan guna memfokuskan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015 ?
2. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015 ?
3. Bagaimana pengaruh Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015 ?
4. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2011 – 2015 ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2015
2. Menganalisis bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2015
3. Menganalisis bagaimana pengaruh Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 -2015
4. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2015

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai media untuk mengembangkan diri dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah.
 - b. Bagi akademisi, penelitian ini akan menambah wawasan untuk para akademisi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan acuan bagi mahasiswa sebagai bahan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi masyarakat/pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. Dan diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi.
- b. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi baru bagi para pengambil kebijakan dalam memahami masalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat dan daerah lainnya, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.